

Politik Pendidikan Islam Nusantara Pada Masa Kolonial

Hotnida Siregar¹, Wardah², Abdusima Nasution³

^{1,2,3} Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted Jun 02, 2026

Keywords:

Kolonial Belanda
Pendidikan Islam Nusantara
Pesantren
Politik Pendidikan
Sejarah Pendidikan Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji politik pendidikan Islam Nusantara pada masa kolonial serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa kolonial menjadi salah satu sarana penting dalam mempertahankan identitas keagamaan, budaya, dan semangat perlawanan masyarakat terhadap dominasi pemerintah kolonial. Kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda cenderung bersifat diskriminatif, dengan memberikan akses pendidikan modern yang terbatas kepada masyarakat pribumi, sementara lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah berada di luar sistem pendidikan resmi kolonial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen sejarah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, reduksi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan politik pendidikan Islam pada masa kolonial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik pendidikan kolonial Belanda bertujuan untuk mendukung kepentingan pemerintahan kolonial melalui kontrol terhadap sistem pendidikan dan pembentukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan kolonial. Di sisi lain, pendidikan Islam berkembang secara mandiri melalui pesantren dan madrasah yang berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan moral, pelestarian budaya Islam, dan pergerakan sosial masyarakat. Kebijakan kolonial yang membatasi perkembangan pendidikan Islam justru mendorong munculnya berbagai pembaruan pendidikan Islam yang dipelopori oleh ulama dan organisasi Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam Nusantara pada masa kolonial memiliki peran strategis dalam menjaga identitas keislaman dan menumbuhkan kesadaran kebangsaan yang kemudian berkontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hotnida Siregar,
Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan
Jl.T. Rizal Nurdin No. Km 4, Sihitang, Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22733. Indonesia.
Email: hotnidasrg01@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Nusantara memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan Islam di wilayah kepulauan Indonesia. Sejak kedatangan Islam sekitar abad ke-13, lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai berkembang di berbagai daerah melalui pesantren, surau, dayah,

dan langgar. Lembaga pendidikan tersebut menjadi pusat penyebaran ajaran Islam sekaligus pusat pembentukan karakter masyarakat Muslim di Nusantara (Jambak et al., 2025).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Sistem pendidikan pesantren menekankan pada pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning), pembinaan moral, serta hubungan yang erat antara kiai dan santri (Wirayanti et al., 2024). Sistem pendidikan ini berkembang secara mandiri dan didukung penuh oleh masyarakat.

Ketika bangsa Barat mulai datang ke Nusantara, terutama Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), sistem pendidikan yang sudah berkembang tersebut mengalami berbagai perubahan. Pemerintah kolonial Belanda mulai menerapkan kebijakan pendidikan yang bersifat politis dan diskriminatif. Pendidikan kolonial dirancang untuk mendukung kepentingan administrasi pemerintahan kolonial serta memperkuat kekuasaan mereka di wilayah jajahan.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi salah satu alat politik yang digunakan oleh pemerintah kolonial untuk mengontrol masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial sering memandang lembaga pendidikan Islam sebagai ancaman karena lembaga tersebut memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat serta berpotensi menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah (Safia & Astuti, 2025).

Oleh karena itu, pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan untuk membatasi perkembangan pendidikan Islam, seperti pengawasan terhadap pesantren, pembatasan kegiatan guru agama, serta penerapan regulasi pendidikan tertentu. Namun demikian, lembaga pendidikan Islam tetap mampu bertahan dan bahkan menjadi salah satu pusat pembentukan kesadaran nasional serta perlawanan terhadap kolonialisme.

Kajian mengenai politik pendidikan Islam pada masa kolonial menjadi penting untuk memahami bagaimana hubungan antara kekuasaan politik kolonial dengan perkembangan pendidikan Islam di Nusantara. Selain itu, kajian ini juga memberikan gambaran mengenai strategi yang dilakukan oleh umat Islam dalam mempertahankan identitas keagamaan serta sistem pendidikan mereka di tengah tekanan kolonial.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan historis. Data diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, dan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan politik pendidikan Islam Nusantara pada masa kolonial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis historis untuk memahami perkembangan serta kebijakan pendidikan Islam pada masa kolonial.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Pendidikan Islam di Nusantara Sebelum Masa Kolonial

Sebelum kedatangan bangsa Barat, pendidikan Islam telah berkembang secara luas di berbagai wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam muncul seiring dengan proses Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama dan pedagang Muslim. Salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam yang berkembang adalah pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional yang dipimpin oleh seorang kiai dan menjadi tempat para santri belajar ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tauhid, dan tasawuf (Niswah et al., 2025).

Ciri-ciri pesantren pada masa itu antara lain:

- a. Sistem pendidikan berbasis asrama (pondok).
- b. Pengajaran menggunakan kitab-kitab klasik atau kitab kuning.
- c. Metode belajar seperti sorogan, bandongan, dan halaqah.
- d. Hubungan guru dan murid sangat dekat dan bersifat kekeluargaan.

Selain pesantren di Jawa, terdapat pula bentuk lembaga pendidikan Islam lainnya seperti surau di Minangkabau. Di wilayah Minangkabau (Sumatera Barat), pendidikan Islam dilaksanakan melalui lembaga yang disebut surau. Surau pada awalnya berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan masyarakat.

Seiring perkembangan Islam, surau juga menjadi tempat pendidikan bagi para pemuda yang belajar membaca Al-Qur'an, ilmu fikih, tasawuf, serta ilmu-ilmu dasar agama. Sistem pendidikan di surau dipimpin oleh seorang syekh atau ulama yang dihormati oleh masyarakat. Di Aceh, lembaga pendidikan Islam dikenal dengan nama dayah atau meunasah. Dayah berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam tingkat lanjut, sedangkan meunasah biasanya digunakan sebagai tempat belajar dasar agama bagi masyarakat. Dayah memiliki peran penting dalam melahirkan ulama-ulama Aceh yang berpengaruh dalam perkembangan Islam di Nusantara. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pengembangan masyarakat. Materi pendidikan Islam sebelum masa kolonial berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan, antara lain:

- a. Al-Qur'an dan tajwid
- b. Ilmu fikih (hukum Islam)
- c. Hadis
- d. Tasawuf dan akhlak
- e. Ilmu nahwu dan sharaf (tata bahasa Arab)

Kitab-kitab yang dipelajari sebagian besar berasal dari karya ulama Timur Tengah. Pengajaran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan santri. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa itu bersifat sederhana tetapi efektif, antara lain:

- a. Halaqah – santri duduk melingkar di sekitar guru untuk mendengarkan penjelasan.
- b. Bandongan – guru membaca dan menjelaskan kitab, sedangkan santri menyimak.
- c. Sorogan – santri membaca kitab di hadapan guru untuk dikoreksi.
- d. Hafalan – digunakan untuk menghafal ayat Al-Qur'an, hadis, atau teks kitab.

Metode tersebut menekankan pada kedalaman pemahaman ilmu agama dan pembentukan akhlak. Secara umum, pendidikan Islam di Nusantara sebelum masa kolonial memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Berbasis masyarakat dan tidak diatur oleh pemerintah.
2. Berorientasi pada pembentukan akhlak dan religiusitas.
3. Menggunakan sistem pendidikan tradisional dengan hubungan erat antara guru dan murid.
4. Terintegrasi dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pendidikan Islam di Nusantara sebelum masa kolonial. Mereka tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat, penyebar agama, dan penasihat kerajaan. Beberapa ulama besar Nusantara bahkan menuntut ilmu di Timur Tengah, kemudian kembali ke tanah air untuk mengembangkan pendidikan Islam di daerahnya. Keberadaan lembaga pendidikan Islam tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara telah memiliki sistem pendidikan yang mandiri sebelum masuknya sistem pendidikan Barat.

3.2 Politik Pendidikan Kolonial Terhadap Lembaga Pendidikan Islam.

3.2.1. Latar Belakang Politik Pendidikan Kolonial

Kedatangan bangsa Barat ke Nusantara sejak abad ke-16 membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pendidikan dijadikan sebagai salah satu instrumen penting untuk mempertahankan kekuasaan kolonial serta mendukung kepentingan administrasi pemerintahan di wilayah jajahan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial tidak sepenuhnya bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat pribumi, melainkan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang dapat membantu jalannya pemerintahan kolonial (Irwan et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, pemerintah kolonial Belanda mengembangkan sistem pendidikan yang bersifat elitis, diskriminatif, dan terbatas bagi masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah modern yang didirikan oleh pemerintah kolonial lebih diperuntukkan bagi kalangan tertentu seperti anak-anak bangsawan atau priyayi yang dianggap mampu menjadi perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat pribumi (Madyan et al., 2025).

Sementara itu, lembaga pendidikan Islam yang telah berkembang jauh sebelum kedatangan kolonial, seperti pesantren, surau, dan dayah, tidak mendapatkan perhatian yang sama dari

pemerintah kolonial. Bahkan dalam beberapa kasus, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dipandang sebagai potensi ancaman karena dianggap dapat menumbuhkan kesadaran keagamaan dan semangat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial (Aziz & Ahmad, 2026).

3.2.2 Tujuan Politik Pendidikan Kolonial

Politik pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki beberapa tujuan strategis yang berkaitan dengan kepentingan kolonialisme. Pertama, pendidikan digunakan sebagai sarana untuk mencetak tenaga kerja yang terdidik namun tetap berada dalam posisi subordinat, sehingga dapat membantu menjalankan administrasi pemerintahan kolonial dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan tenaga kerja dari Eropa (Firdiyansyah, 2024).

Kedua, pendidikan kolonial bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya Barat kepada masyarakat pribumi. Melalui kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan, pemerintah kolonial berusaha membentuk pola pikir masyarakat yang lebih dekat dengan nilai-nilai Barat dan menjauh dari sistem pendidikan tradisional yang telah berkembang sebelumnya (Praekanata et al., 2024).

Ketiga, pemerintah kolonial juga menggunakan kebijakan pendidikan sebagai alat kontrol sosial terhadap masyarakat pribumi. Dengan mengatur akses terhadap pendidikan serta mengawasi lembaga-lembaga pendidikan yang ada, pemerintah kolonial dapat memantau perkembangan intelektual masyarakat dan mencegah munculnya gerakan yang dapat mengancam kekuasaan mereka (Safia & Astuti, 2025). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan Islam sering kali menjadi sasaran pengawasan karena dianggap memiliki potensi untuk menumbuhkan solidaritas keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat. Para ulama dan santri yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat sering dipandang sebagai tokoh yang dapat memobilisasi perlawanan terhadap kolonialisme (Syahriyah & Mawardi, 2025).

3.3 Kebijakan Pemerintah Kolonial terhadap Pendidikan Islam

3.3.1 Diskriminasi terhadap Lembaga Pendidikan Islam

Salah satu bentuk politik pendidikan kolonial adalah adanya diskriminasi terhadap lembaga pendidikan Islam. Pemerintah kolonial lebih memprioritaskan pengembangan sekolah-sekolah Barat seperti *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)*, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, dan *Algemene Middelbare School (AMS)*. Sekolah-sekolah tersebut menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan menerapkan kurikulum yang berorientasi pada ilmu pengetahuan Barat (Alfarisy, 2021). Sebaliknya, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren tidak mendapatkan bantuan maupun dukungan dari pemerintah kolonial. Pendidikan di pesantren tetap berjalan secara mandiri dengan dukungan masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pendidikan kolonial dan pendidikan Islam tradisional (Yustisia, 2025).

3.3.2 Ordonansi Guru dan Pengawasan Pendidikan Islam

Salah satu bentuk politik pendidikan kolonial terhadap pendidikan Islam adalah diterapkannya Ordonansi Guru (*Guru Ordonantie*) pada tahun 1905 dan diperketat kembali pada tahun 1925. Peraturan ini mengharuskan setiap guru agama Islam untuk mendapatkan izin dari pemerintah sebelum mengajar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengawasi aktivitas para ulama serta mencegah penyebaran ajaran yang dianggap dapat memicu perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Selain Ordonansi Guru, pemerintah kolonial juga menerapkan Ordonansi Sekolah Liar (*Wild School Ordinance*) pada tahun 1932. Peraturan ini bertujuan untuk mengontrol sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat tanpa izin pemerintah. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kolonial berusaha membatasi perkembangan pendidikan Islam serta mengontrol aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi (Irwan et al., 2024).

3.3.3 Pembatasan Materi Pendidikan Islam

Pemerintah kolonial juga berusaha membatasi materi pendidikan yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Materi yang berkaitan dengan semangat jihad, solidaritas umat Islam, dan konsep kepemimpinan dalam Islam sering dianggap berpotensi menumbuhkan sikap anti-kolonial. Oleh karena itu, pemerintah kolonial berupaya mengontrol penyebaran literatur keagamaan serta memantau aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh para ulama di berbagai daerah (Hasanah et al., 2025).

3.4 Dampak Politik Pendidikan Kolonial terhadap Pendidikan Islam

Politik pendidikan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Nusantara membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan kolonial pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan administratif dan memperkuat kekuasaan penjajah, sehingga cenderung mengabaikan bahkan meminggirkan pendidikan Islam yang telah lebih dahulu berkembang di tengah masyarakat. Salah satu dampak paling nyata adalah terjadinya:

- A. Dualisme sistem pendidikan, yaitu adanya pemisahan antara pendidikan Barat (kolonial) dan pendidikan Islam tradisional. Pendidikan kolonial yang menggunakan sistem klasikal, kurikulum modern, serta bahasa Belanda dianggap lebih unggul dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sementara itu, pendidikan Islam seperti pesantren sering kali tidak mendapatkan pengakuan resmi dan bahkan dipandang sebagai lembaga yang tertinggal.
- B. Marginalisasi lembaga pendidikan Islam. Pemerintah kolonial tidak memberikan bantuan finansial maupun dukungan struktural kepada pesantren dan madrasah. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas pendidikan Islam karena dianggap berpotensi menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah.
- C. Kesenjangan sosial dan intelektual di kalangan masyarakat. Lulusan sekolah kolonial memiliki akses lebih besar terhadap pekerjaan di pemerintahan dan sektor formal, sementara lulusan pendidikan Islam cenderung terbatas pada lingkungan keagamaan. Hal ini menciptakan stratifikasi sosial berbasis pendidikan yang cukup tajam.

Namun demikian, di balik dampak negatif tersebut, politik pendidikan kolonial juga secara tidak langsung mendorong terjadinya:

- A. Pembaruan dalam pendidikan Islam. Kesadaran akan ketertinggalan membuat sebagian tokoh Muslim melakukan reformasi pendidikan dengan mendirikan madrasah modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Pembaruan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperluas perannya dalam masyarakat.
- B. Kesadaran nasionalisme dan semangat perlawanan di kalangan umat Islam. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pembinaan kesadaran politik dan sosial untuk melawan penjajahan. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan penting dalam membangun identitas dan solidaritas umat dalam perjuangan menuju kemerdekaan.

3.5 Respons dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam

Respons dan adaptasi lembaga pendidikan Islam pada masa kolonial merupakan bagian penting dari dinamika sejarah pendidikan di Nusantara. Dalam menghadapi tekanan dan kebijakan pemerintah kolonial, lembaga seperti pesantren, surau, dan madrasah tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan berbagai bentuk penyesuaian strategis. Sikap resistensi atau perlawanan merupakan salah satu bentuk respons utama lembaga pendidikan Islam terhadap sistem pendidikan kolonial. Perlawanan ini muncul karena sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dinilai bersifat sekuler, yaitu memisahkan agama dari kehidupan, serta lebih berorientasi pada kepentingan administratif dan politik penjajah daripada pembentukan moral dan spiritual masyarakat pribumi (Ridhotullah & Ifendi, 2024).

Dalam konteks ini, banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren tradisional, memilih untuk tidak mengikuti sistem pendidikan kolonial. Mereka tetap mempertahankan sistem pendidikan yang telah diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penegasan identitas keislaman. Kurikulum yang digunakan tetap berbasis pada kitab kuning, yaitu kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu yang mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fikih, tauhid, tafsir, dan tasawuf. Selain itu, metode pembelajaran yang digunakan juga tidak berubah, yaitu metode sorogan (santri belajar secara individual kepada kiai) dan bandongan (kiai membaca dan menjelaskan kitab di hadapan banyak santri). Metode ini tidak hanya menekankan penguasaan ilmu, tetapi juga membangun hubungan spiritual dan intelektual antara kiai dan santri. Peran kiai dalam pesantren juga tetap menjadi pusat otoritas pendidikan. Kiai tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual, pembimbing moral, dan panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan kiai menjadi simbol independensi lembaga pendidikan Islam dari intervensi kolonial(QUSYAIRI, 2026).

Lebih jauh, perlawanan ini tidak hanya bersifat teknis dalam bentuk penolakan terhadap sistem pendidikan Barat, tetapi juga bersifat ideologis. Lembaga pendidikan Islam berupaya menjaga kemurnian ajaran Islam serta mempertahankan kemandirian umat dari pengaruh budaya dan pemikiran Barat yang dianggap dapat melemahkan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, pesantren menjadi benteng pertahanan budaya dan agama sekaligus pusat pembentukan kesadaran kolektif umat Islam terhadap pentingnya menjaga identitas dan bahkan melawan penjajahan(Munir, 2025).

3.6 Perkembangan pesantren dan madrasah pada masa kolonial.

Perkembangan pesantren dan madrasah pada masa kolonial merupakan bagian penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Pada periode ini, lembaga pendidikan Islam tidak hanya menghadapi tekanan dari sistem pendidikan kolonial, tetapi juga mengalami transformasi yang signifikan sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, politik, dan intelektual(Rohati et al., 2025).

3.6.1 Eksistensi dan Perkembangan Pesantren Tradisional

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berkembang jauh sebelum kedatangan kolonial. Pada masa kolonial, pesantren tetap mempertahankan eksistensinya sebagai pusat pendidikan keagamaan yang mandiri. Sistem pendidikan pesantren bersifat tradisional dengan ciri khas pengajaran kitab kuning, serta penggunaan metode sorogan dan bandongan. Pesantren juga berfungsi sebagai pusat pembentukan karakter dan moral masyarakat. Kiai sebagai pemimpin pesantren memiliki peran yang sangat dominan, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai figur otoritatif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial, pesantren tetap bertahan karena memiliki basis sosial yang kuat di masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, pesantren menjadi pusat resistensi terhadap kolonialisme dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dan semangat perlawanan kepada para santri. Namun demikian, pesantren juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap ilmu pengetahuan umum dan teknologi modern. Hal ini menyebabkan sebagian pesantren dianggap tertinggal dibandingkan dengan sekolah kolonial yang lebih maju secara sistem dan fasilitas(Tamim, 2024).

3.6.2 Lahirnya Madrasah sebagai Bentuk Pembaruan

Sebagai respons terhadap perkembangan zaman dan sistem pendidikan kolonial, muncul lembaga pendidikan baru yang disebut madrasah. Madrasah merupakan bentuk modernisasi pendidikan Islam yang menggabungkan sistem tradisional dengan unsur-unsur pendidikan Barat.Madrasah mulai menerapkan sistem klasikal dengan pembagian kelas, kurikulum yang terstruktur, serta penggunaan metode pengajaran yang lebih sistematis. Selain itu, madrasah juga memasukkan pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa asing ke dalam kurikulumnya. Kehadiran madrasah menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat Muslim yang menginginkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada agama, tetapi juga mampu menjawab tuntutan modernitas. Dengan demikian, madrasah berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan tradisional pesantren dan pendidikan modern Barat(Sari et al., 2025).

3.6.3 Peran Tokoh dan Organisasi Islam dalam Pengembangan Pendidikan

Perkembangan madrasah tidak terlepas dari peran tokoh dan organisasi Islam yang berupaya melakukan reformasi pendidikan. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memainkan peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa kolonial. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang mendorong modernisasi pendidikan dengan mengadopsi sistem pendidikan Barat secara selektif, seperti penggunaan kurikulum terpadu dan metode pengajaran modern. Sementara itu, Nahdlatul Ulama lebih menekankan pada pelestarian tradisi pesantren, meskipun tetap melakukan pembaruan secara bertahap. Peran organisasi-organisasi ini sangat penting dalam memperluas akses pendidikan bagi umat Islam serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam di Indonesia(Akbar, n.d.).

3.6.4 Transformasi Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Islam

Transformasi sistem dan kelembagaan pendidikan Islam pada masa kolonial merupakan salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan umat Islam dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan intelektual akibat masuknya pengaruh Barat. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pembelajaran, tetapi juga mencakup perubahan struktur kelembagaan, manajemen pendidikan, serta orientasi tujuan pendidikan Islam itu sendiri (As-Shidqi et al., 2025).

A. Perubahan Sistem Pembelajaran

Salah satu bentuk transformasi yang paling menonjol adalah perubahan sistem pembelajaran dari pola tradisional menuju sistem yang lebih modern. Sebelum masa kolonial, pendidikan Islam di pesantren menggunakan metode sorogan dan bandongan, yang bersifat individual dan tidak terstruktur secara klasikal. Namun, seiring dengan berkembangnya sistem pendidikan kolonial, lembaga pendidikan Islam mulai mengadopsi sistem klasikal dengan pembagian kelas berdasarkan tingkat kemampuan santri. Selain itu, penggunaan jadwal pelajaran, kurikulum yang terstruktur, serta sistem evaluasi mulai diterapkan. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan diri dengan standar pendidikan modern (Harmathilda et al., 2024).

B. Pembaruan Kurikulum Pendidikan

Transformasi juga terjadi pada aspek kurikulum. Jika sebelumnya pendidikan Islam hanya berfokus pada ilmu-ilmu keagamaan, maka pada masa kolonial mulai terjadi integrasi dengan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa asing. Pembaruan kurikulum ini merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sekaligus upaya untuk meningkatkan daya saing lulusan lembaga pendidikan Islam di tengah dominasi sistem pendidikan kolonial (Qadariah, 2026).

C. Modernisasi Kelembagaan

Dalam aspek kelembagaan, terjadi perubahan dari sistem yang bersifat informal menuju sistem yang lebih formal dan terorganisasi. Lembaga pendidikan Islam mulai mengadopsi sistem administrasi modern. Membentuk struktur organisasi yang jelas. Mengelola pendidikan secara lebih profesional (Rodin et al., 2025).

Perubahan ini ditandai dengan munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang memiliki kurikulum, jenjang pendidikan, serta sistem pengelolaan yang lebih sistematis dibandingkan pesantren tradisional.

3.6.5 Dampak Perkembangan Pesantren dan Madrasah

Perkembangan pesantren dan madrasah pada masa kolonial membawa dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain:

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan
- b. Lahirnya generasi Muslim yang lebih terdidik dan berwawasan luas
- c. Terjadinya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum

Namun, di sisi lain, juga muncul tantangan berupa perbedaan orientasi antara pesantren tradisional dan madrasah modern yang terkadang menimbulkan ketegangan dalam praktik pendidikan Islam.

3.7 Peran Ulama dalam Mempertahankan Pendidikan Islam pada Masa Penjajahan

Ulama memiliki peran yang sangat strategis dalam mempertahankan eksistensi pendidikan Islam pada masa penjajahan. Dalam situasi di mana pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang cenderung sekuler dan diskriminatif terhadap lembaga pendidikan Islam, ulama tampil sebagai tokoh sentral yang tidak hanya menjaga keberlangsungan pendidikan, tetapi juga menjadi penggerak perlawanan kultural dan spiritual umat Islam (Irwan et al., 2024).

3.7.1 Ulama sebagai Penjaga Tradisi Keilmuan Islam

Pada masa kolonial, ketika sistem pendidikan Barat mulai diperkenalkan dan cenderung mengabaikan aspek religius, ulama tetap mempertahankan sistem pendidikan berbasis pesantren. Mereka terus mengajarkan kitab kuning sebagai rujukan utama dalam pembelajaran. Kitab-kitab ini mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf, yang menjadi fondasi utama dalam membentuk pemahaman keislaman santri. Lebih jauh, ulama juga berperan dalam menjaga otoritas keilmuan melalui sistem sanad (rantai transmisi ilmu). Sanad menjadi bukti

bahwa ilmu yang diajarkan memiliki legitimasi dan keterhubungan dengan ulama-ulama sebelumnya hingga kepada sumber utama ajaran Islam (Mahfuzah & Huda, 2026). Dengan adanya sanad, tradisi keilmuan Islam tetap terjaga keasliannya meskipun berada di bawah tekanan kolonialisme. Dengan demikian, peran ulama sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan formal, tetapi juga mencakup pelestarian nilai, metode, dan otoritas keilmuan. Peran ini menjadi sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan Islam di tengah dominasi sistem pendidikan kolonial yang berbeda secara ideologis.

3.7.2 Ulama sebagai Pemimpin dan Otoritas Pendidikan

Kedudukan ulama sebagai otoritas pendidikan didasarkan pada kedalaman ilmu agama yang dimiliki serta pengakuan masyarakat terhadap kapasitas keilmuan dan moralnya. Hal ini menjadikan ulama sebagai figur sentral yang memiliki legitimasi kuat dalam menentukan arah pendidikan Islam. Selain itu, ulama juga berperan sebagai pembimbing spiritual dan sosial. Mereka tidak hanya mendidik santri di dalam pesantren, tetapi juga menjadi rujukan masyarakat dalam berbagai persoalan keagamaan. Dengan peran tersebut, ulama mampu menjaga keberlangsungan pendidikan Islam sekaligus mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah tekanan kolonial (Abbas et al., 2024).

3.7.3 Ulama sebagai Penggerak Perlawanan Kultural

Ulama berperan sebagai penggerak perlawanan kultural dalam menghadapi penjajahan dengan menjadikan pendidikan Islam sebagai sarana mempertahankan identitas dan nilai-nilai keislaman. Melalui pesantren, ulama menanamkan ajaran agama, semangat kemandirian, serta sikap kritis terhadap dominasi budaya dan sistem kolonial yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Perlawanan ini tidak selalu dilakukan secara fisik, tetapi lebih bersifat ideologis dan kultural, yaitu dengan menjaga tradisi keilmuan, bahasa, serta praktik keagamaan umat Islam. Dengan cara ini, ulama berhasil membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan tidak terpengaruh oleh hegemoni budaya Barat (Al Hashas et al., 2025).

3.7.4 Ulama sebagai Agen Pembaruan Pendidikan

Selain sebagai penjaga tradisi, ulama juga berperan sebagai agen pembaruan pendidikan Islam pada masa penjajahan. Mereka menyadari bahwa perubahan sosial menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pendidikan, sehingga mulai memperkenalkan unsur-unsur modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Pembaruan ini terlihat dari upaya ulama dalam mengembangkan madrasah dengan sistem klasikal, kurikulum terstruktur, serta memasukkan ilmu pengetahuan umum seperti matematika, ilmu alam, dan bahasa asing. Langkah ini bertujuan agar lulusan pendidikan Islam mampu bersaing dengan lulusan sekolah kolonial. Selain itu, ulama juga terlibat dalam gerakan organisasi yang mendorong modernisasi pendidikan, sehingga pendidikan Islam menjadi lebih sistematis, terbuka, dan relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, ulama tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mendorong kemajuan pendidikan Islam (Hidayat et al., 2025).

3.7.5 Ulama sebagai Penghubung Jaringan Keilmuan

Ulama memiliki peran penting sebagai penghubung jaringan keilmuan Islam, baik di tingkat lokal maupun internasional. Pada masa penjajahan, banyak ulama Nusantara yang menuntut ilmu ke pusat-pusat pendidikan Islam di Timur Tengah seperti Makkah dan Madinah, kemudian kembali ke tanah air untuk mengembangkan pendidikan Islam. Melalui jaringan ini, terjadi pertukaran ilmu, pemikiran, dan metode pendidikan yang memperkaya tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Ulama membawa kitab-kitab baru, gagasan pembaruan, serta memperkuat sistem sanad keilmuan yang menghubungkan mereka dengan ulama-ulama terdahulu. Peran ini menjadikan pendidikan Islam di Nusantara tidak terisolasi, tetapi tetap terhubung dengan perkembangan dunia Islam secara global. Dengan demikian, ulama berkontribusi dalam menjaga dinamika dan kualitas pendidikan Islam di tengah tekanan kolonial (Azhari, 2025).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian materi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Nusantara telah berkembang secara mandiri dan kuat sebelum masa kolonial melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, surau, dan dayah. Sistem pendidikan ini berakar pada nilai-nilai keislaman, berorientasi

pada pembentukan akhlak, serta terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Ulama memegang peran sentral sebagai pendidik, pemimpin, dan penggerak dakwah, sehingga pendidikan Islam menjadi bagian penting dalam struktur sosial masyarakat. Masuknya kolonialisme membawa perubahan besar melalui politik pendidikan yang bersifat diskriminatif, elitis, dan berorientasi pada kepentingan penjajah. Kebijakan tersebut menimbulkan dampak seperti dualisme sistem pendidikan, marginalisasi lembaga pendidikan Islam, serta kesenjangan sosial di masyarakat. Namun demikian, tekanan kolonial juga memicu munculnya kesadaran untuk melakukan pembaruan dalam pendidikan Islam. Dalam menghadapi kondisi tersebut, lembaga pendidikan Islam menunjukkan berbagai bentuk respons, mulai dari resistensi dengan mempertahankan tradisi hingga adaptasi melalui modernisasi sistem pendidikan. Hal ini melahirkan perkembangan baru seperti munculnya madrasah yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Perkembangan pesantren dan madrasah pada masa kolonial menunjukkan adanya dinamika antara tradisi dan modernitas. Pesantren tetap menjadi benteng pertahanan nilai-nilai keislaman, sementara madrasah menjadi simbol pembaruan pendidikan Islam. Transformasi sistem, kurikulum, dan kelembagaan menjadi bukti bahwa pendidikan Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, ulama memiliki peran yang sangat vital dalam mempertahankan pendidikan Islam, baik sebagai penjaga tradisi keilmuan, pemimpin pendidikan, penggerak perlawanan kultural, agen pembaruan, maupun penghubung jaringan keilmuan global. Melalui peran tersebut, ulama tidak hanya menjaga eksistensi pendidikan Islam, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kesadaran nasional dan semangat perjuangan melawan penjajahan. Dengan demikian, pendidikan Islam di Nusantara pada masa kolonial tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara dinamis melalui kombinasi antara pelestarian tradisi dan inovasi, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada masa selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N., Fathurrohman, M., & Fajrin, R. I. M. (2024). MADRASAH MAMBA'UL'ULUM SURAKARTA SIMBOL PERLAWANAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA KOLONIAL BELANDA: MADRASAH MAMBA'UL'ULUM SURAKARTA SIMBOL PERLAWANAN PENDIDIKAN ISLAM DI MASA KOLONIAL BELANDA. *Jurnal Syaikh Mudo Madlawan: Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(2), 94–106.
- Akbar, F. H. (n.d.). *KERJASAMA ANTAR BADAN PERWAKILAN DALAM AKSES PENDIDIKAN ISLAM*.
- Al Hashas, M. N., Hakim, A. L., & Alfaridzih, A. (2025). Agama, budaya, dan negara: Formulasi nasionalisme dalam pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 11(2), 92–116.
- Alfarisy, F. (2021). Kebijakan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia dalam perspektif pembentukan warga dunia dengan kompetensi antarbudaya. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 6(3), 303–313.
- As-Shidqi, M. H., Nugraha, M. S., & Arifudin, O. (2025). Menggali potensi transformasi Islam dan perencanaan pendidikan. *JUMADIL: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 1–15.
- Azhari, H. H. (2025). *TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*. Goresan Pena.
- Aziz, A. A., & Ahmad, A. N. I. (2026). Politik Regulasi Kolonial dan Pengendalian Pendidikan Keagamaan di Nusantara pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda. *Az-Zaida: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(4), 13–34.
- Firdiyansyah, M. M. (2024). Hegemoni Pendidikan Kolonial dan Munculnya Amtenar Bumiputra Di Jawa (1900–1932). *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 7(2), 173–184.
- Harmathilda, H., Yuli, Y., Hakim, A. R., Damayanti, D., & Supriyadi, C. (2024). Transformasi Pendidikan Pesantren Di Era Modern: Antara Tradisi Dan Inovasi. *Karimiyah*, 4(1), 33–50.
- Hasanah, N., Azis, N., & Rama, B. (2025). Transformasi Pendidikan Islam dalam Bayang-Bayang Kolonialisme: Studi Historis Masa Belanda dan Jepang. *AUFKLARUNG: Journal of Education Research & Innovation*, 1(01), 28–35.
- Hidayat, A., Fahmi, K., Anwar, K., & Ananda, F. (2025). Modernisasi Pendidikan Islam Indonesia: Pengalaman Nahdlatul Ulama. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(2), 1364–1371.
- Irwan, I., Ishomuddin, I., & Faridi, F. (2024). Menelusuri Warisan Kebijakan Pendidikan Islam Di

- Masa Kolonial Belanda. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 15(2), 118–134.
- Jambak, M., Iswandi, I., & Saputra, D. (2025). Dampak Pendidikan Islam di Nusantara dan Dampaknya terhadap Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Menata: Jurnal Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 24–33.
- Madyan, M., Nada, N., Fitri, F., Mery, M., & Fahria, F. (2025). Perbandingan Historis Sistem Pendidikan Kolonial Belanda dan Pendidikan Indonesia Masa Kini. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), 856–862.
- Mahfuzah, G. S., & Huda, N. (2026). LEGITIMASI DAN KEBERLANJUTAN SANAD ILMU TAHFIZH AL-QUR'AN PADA PONDOK PESANTREN DAR'ALI AL-BANJARY BANJARMASIN: Legitimacy and Sustainability of the Chain of Knowledge in Quranic Tahfidh at Dar'Ali Al-Banjary Islamic Boarding School Banjarmasin. *TA'LIMUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 112–128.
- Munir, H. A. (2025). *DARI SANTRI UNTUK BANGSA: KESADARAN PROGRESIF KAUM SARUNGAN*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT.
- Niswah, C., Sholihin, M., Zasvenda, M. Y., Amirullah, E., & Dani, A. (2025). Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(6), 308–316.
- Praekanata, I. W. I., Virnayanthi, N. P. E. S., Juliangkary, E., & Ratnaya, I. G. (2024). *Menelusuri arah pendidikan: Dinamika dan inovasi kurikulum di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Qadaryah, L. (2026). Pendekatan Pendidikan dalam Kajian Islam (Dari Dikotomi menuju Dekolonisasi: Rekonstruksi Pendidikan Islam Era Kontemporer Berbasis Epistemologi Tauhid). *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 133–148.
- QUSYAIRI, S. (2026). *KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KYAI DALAM KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM SUMEDANG SARI OKU TIMUR*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Ridhotullah, N. A., & Ifendi, M. (2024). Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan Belanda. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 2(4), 16–30.
- Rodin, R., Putra, W., Sujirman, S., Yanto, M., Azwar, B., & Ifnaldi, I. (2025). Pendekatan klasik dalam teori organisasi dan relevansinya dengan manajemen pendidikan islam: systematic review. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(01), 351–366.
- Rohati, S., Safuri, B., & Kultsum, U. (2025). Kontribusi Madrasah dalam Pelestarian Identitas Budaya dan Agama di Banten pada Masa Kolonial. *Journal of Education Research*, 6(4), 1160–1167.
- Safia, G. F. N., & Astuti, N. Y. (2025). Pendidikan Islam di Bawah Bayang Kolonialisme: Kurikulum, Tantangan dan Perkembangannya. *EDUSHOPIA: Journal of Progressive Pedagogy*, 2(2), 153–163.
- Sari, M., Maela, S., & Ali, D. (2025). Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Pendidikan Islam Di Pesantren, Madrasah, Sekolah Berasrama. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 3(1), 6–10.
- Syahriyah, E., & Mawardi, K. (2025). Hari Santri Nasional: Kajian Sosio-Historis atas Peran Santri dalam Perjuangan dan Perkembangan Bangsa. *QALAM: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 6(01), 46–54.
- Tamim, R. (2024). Pendidikan Islam Di Indonesia (Model Pesantren Dan Madrasah). *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 476–493.
- Wirayanti, W., Erna, E., Cherawati, C., & Khaerani, S. (2024). Metode pendidikan tradisional pesantren dalam membina akhlak santri (Studi Pesantren Nahdlatul Ulum Kabupaten Maros). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 424–437.
- Yustisia, R. (2025). Sejarah Pendidikan Islam Masa Kontemporer di Indonesia. *Tarbiyah Darussalam: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keagamaan*, 9(02), 558–572.